

<i>Jurnal Warna : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia dini.</i>		
<i>Maret 2026 . Vol 11. No. 01</i>		
<i>Received: Februari 2026</i>	<i>Accepted: Februari 2026</i>	<i>Published: Maret 2026</i>
<i>Article DOI: 10.24903/jw.v11i1.2336</i>		

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAUD PRA-SD DALAM MEMFASILITASI KESIAPAN BELAJAR ANAK USIA DINI DI KOTA BATU**

**Mayunita Nurlaila**

Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S2 Pendidikan Anak Usia Dini  
Universitas Negeri Malang  
[nitarayyan1408@gmail.com](mailto:nitarayyan1408@gmail.com)

**Imron Arifin**

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang  
[imron.arifin.fip@um.ac.id](mailto:imron.arifin.fip@um.ac.id)

**Sri Wahyuni**

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang  
[sri.wahyuni.fip@um.ac.id](mailto:sri.wahyuni.fip@um.ac.id)

### **Abstrak**

Dalam rangka mendukung keberhasilan masa transisi anak usia dini ke Sekolah Dasar (SD), Pemerintah Kota Batu menetapkan Peraturan Wali (Perwali) No. 94 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Penelitian mengenai implementasi kebijakan tersebut masih sangat minim dilakukan, dan umumnya kajian terdahulu berfokus pada aspek pedagogis dan perkembangan anak. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam mendukung kesiapan belajar anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi multi situs. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara mendalam terhadap kepala sekolah dan guru PAUD, observasi langsung pada kegiatan persiapan SD, dan studi dokumentasi sehubungan implementasi kebijakan. Analisis data mengacu pada Miles et al. (2014), yang terdiri dari empat tahapan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan mendukung kesiapan belajar anak usia dini dan keikutsertaan pada PAUD membantu kesiapan masuk SD. Faktor pendukung diantaranya: kepemimpinan transformatif kepala sekolah, kurikulum yang sesuai untuk PAUD, pengorganisasian kelembagaan yang jelas, ketersediaan PAUD, sarana-prasarana, dan partisipasi orang tua. Sedangkan tantangan yang dihadapi, diantaranya: koordinasi PAUD-SD belum optimal, pola pengasuhan orang tua, ketidaksinambungan metode pembelajaran, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang PAUD, beban kerja guru yang tinggi, dinamika perubahan kurikulum, keterbatasan SDM, kualitas PAUD yang tidak merata, dan pembiayaan PAUD gratis yang belum maksimal. Penelitian ini memberikan kontribusi pengayaan kajian implementasi kebijakan dukungan pada PAUD pada level pemerintah daerah, dengan merekomendasikan *collaborative governance* untuk mendukung sukses kebijakan dukungan transisi anak usia dini.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Kesiapan Belajar, Transisi PAUD-SD, Kurikulum

### **Abstract**

*In order to support the successful transition of early childhood education (ECE) to Primary School (PS), the Government of Batu City enacted policy concerning the Implementation of ECE. Research examining the implementation of this policy remains limited, as previous studies have predominantly focused on pedagogical aspects and child development. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the policy in supporting children's school readiness. This study employed a descriptive qualitative method with a multi-site study design. Data were collected through in-depth interviews with ECE principals and teachers, direct*

<i>Jurnal Warna : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia dini.</i>		
<i>Maret 2026 . Vol 11. No. 01</i>		
<i>Received: Februari 2026</i>	<i>Accepted: Februari 2026</i>	<i>Published: Maret 2026</i>
<i>Article DOI: 10.24903/jw.v11i1.2336</i>		

*observations of school readiness activities for PS, and documentation studies related to policy implementation. Data analysis followed the framework of Miles et al. (2014), which consists of four stages: data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The findings indicate, the implementation of the policy supports early childhood learning readiness, and participation in ECE contributes to children's preparedness for entering PS. Supporting factors include school principals' transformative leadership, appropriate ECE curricula, clear institutional organization, availability of ECE, adequate facilities and infrastructure, and parental participation. Meanwhile, several challenges were identified: suboptimal coordination between ECE and PS, parenting practices, discontinuity in instructional methods, limited public understanding of ECE, high teacher workload, curriculum changes, limited human resources, unequal quality of ECE institutions, and the limited of free ECE financing. This study contributes to enriching the literature on policy implementation supporting ECE and recommends the adoption of a collaborative governance approach to strengthen policies that facilitate successful transitions for young children into PS.*

**Keywords:** *Policy, School Readiness, ECE–Primary School Transition, Curriculum.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia sejak dini, karena pada usia dini, anak berada dalam masa keemasan (*golden age*) yang sangat menentukan perkembangan selanjutnya (Alvarado-Suárez & Acosta-González, 2022; Rokhmah & Hambali, 2024). Kesiapan belajar anak usia dini menjadi salah satu indikator penting yang harus dicapai sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Kesiapan ini tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga mencakup perkembangan sosial-emosional, motorik, bahasa, serta moral dan spiritual anak (Al Munawaroh et al., 2023; Duncan et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan anak-anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan yang layak, merata, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka (Nolan & Molla, 2023; Rao et al., 2023).

Pemerintah Kota Batu sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan PAUD. Hal ini terlihat

dari ditetapkannya kebijakan strategis yakni Peraturan Wali Kota (Perwali) Batu Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem layanan PAUD yang holistik, integratif, dan berkualitas. Perwali ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini di wilayah Kota Batu, termasuk dalam aspek fasilitasi kesiapan belajar anak usia dini.

Kesiapan belajar (*school readiness*) pada anak usia dini secara konseptual tidak semata-mata dimaknai sebagai penguasaan kemampuan akademik awal seperti membaca, menulis, dan berhitung, melainkan mencakup kematangan sosial-emosional, regulasi diri, kemandirian, kemampuan berinteraksi, serta kesiapan mengikuti aturan dalam lingkungan belajar yang lebih terstruktur (Ansari et al., 2021; Magnuson et al., 2004; Pangestuti et al., 2026). Perspektif ini menempatkan kesiapan belajar sebagai konstruk multidimensional yang bersifat holistic (Ghandour et al., 2019;

Rodríguez-Rabassa et al., 2025). Oleh karenanya kesiapan belajar bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, seperti kualitas layanan pendidikan, lingkungan belajar yang stimulatif, keterlibatan orang tua, serta dukungan kebijakan yang memadai (Cheah et al., 2026; Ernst et al., 2025).

Dalam hal dukungan kebijakan, keberadaan kebijakan seperti Perwali Batu No. 94 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi penguat dalam menciptakan ekosistem PAUD yang mendukung (Zhang, 2025). Implementasi kebijakan tidak berhenti pada tahap formulasi regulasi, melainkan ditentukan oleh proses pelaksanaan di tingkat lapangan. Justru di lapangan atau pada saat implementasi tersebut seringkali ditemukan masalah. Seringkali dokumen sudah disahkan, tetapi gagal dilaksanakan secara nasional, karena ambiguitas konsep, lemahnya kolaborasi lintas sektor, dan kapasitas struktural serta mobilisasi sumber daya yang kurang memadai (Atashbahar et al., 2021).

Secara teoretis, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung (Aivalli et al., 2025; Edward, 1980; Nuryana et al., 2025). Kelemahan dalam salah satu komponen tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan secara optimal. Dalam konteks pendidikan daerah, dinamika implementasi sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan sosialisasi, ketidaksinambungan

antarjenjang pendidikan, serta variasi kapasitas lembaga pelaksana (Lu & Matheny, 2026; Muthanna & Sang, 2023).

Data awal melalui wawancara dengan guru kelas awal Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum memiliki kesiapan belajar yang memadai. Kondisi ini terlihat dari berbagai aspek, terutama kesulitan dalam penyesuaian emosional, sosial, dan kognitif pada awal proses pembelajaran (Apriliyanti, 2022; Hidayati et al., 2023; Teleková et al., 2023). Salah satu indikator yang sering muncul adalah ketidakstabilan emosi saat awal kedatangan ke sekolah, seperti enggan berpisah dari orang tua dan kesulitan untuk fokus mengikuti kegiatan pembelajaran (Pirkanen et al., 2019).

Selain aspek emosional, kesiapan kognitif juga menjadi perhatian penting. Beberapa guru menyampaikan bahwa masih banyak anak yang belum mengenal keaksaraan awal maupun konsep dasar berhitung sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwa stimulasi literasi dan numerasi pada masa pra-sekolah belum sepenuhnya optimal (Nurbaiti et al., 2023; Piasta et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam konteks implementasi Peraturan Wali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2020, khususnya dalam kaitannya dengan upaya memfasilitasi kesiapan belajar anak usia dini di lembaga PAUD. Kajian mengenai implementasi kebijakan pada level pemerintah daerah menjadi penting untuk mengetahui

sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar.

Secara praktis, konteks penelitian ini juga sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pendekatan pembelajaran berpusat pada anak (*child-centered*) dan berlandaskan pada prinsip perkembangan anak secara holistic (Ha, Lien, and Hang, 2025). Dalam kerangka ini, kebijakan daerah seperti Peraturan Wali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2020 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa lembaga PAUD memiliki panduan, dukungan, serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan perannya secara optimal. Penelitian ini juga relevan dengan arah kebijakan nasional melalui program Wajib Belajar 13 Tahun (PP No 12 Tahun 2025), yang menempatkan PAUD sebagai fondasi penting dalam menciptakan kesiapan belajar sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar (Poerwati et al., 2025).

Demikian penting dukungan kebijakan local dalam mendukung masa transisi anak usia dini, namun penelitian sejenis masih sangat terbatas (Vargas-Barón, 2019). Sehingga penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menganalisis: 1) mengenai implementasi kebijakan Perwali 94 tahun 2020, 2) kesiapan belajar anak, 3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, kemudian 4) merumuskan sebuah strategi untuk mendukung sukses implementasi kebijakan dalam mendukung masa transisi PAUD ke SD.

Harapannya dari penelitian ini diperoleh gambaran pelaksanaan kebijakan dalam mendukung kesiapan anak masuk SD. Sehingga anak bisa memaksimalkan potensinya sejak dini.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada dua lembaga PAUD di Kota Batu yang memiliki karakteristik berbeda, yakni TK Negeri Pembina Kecamatan Batu dan TK Dahlia 01 Kecamatan Bumiaji. TK Negeri Pembina Kecamatan Batu yang kemudian disebut sebagai situs 1 adalah lembaga PAUD berstatus negeri. Sedangkan TK Dahlia 01 Kecamatan Bumiaji adalah lembaga PAUD yang berstatus swasta. Perbedaan karakteristik tersebut akan dapat memberikan Gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak implementasi kebijakan Perwali 94 Tahun 2020.

Pendekatan kualitatif deskriptif dipergunakan dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui interaksi langsung di lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen utama.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan Perwali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2020 pada lembaga PAUD. Informan dalam

penelitian ini terdiri dari kepala sekolah dan guru dari kedua lembaga PAUD yang menjadi lokasi penelitian, sebagaimana ditampilkan pada table 1. Kepala sekolah dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelembagaan terkait implementasi kebijakan. Sedangkan guru dipilih karena terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan yang berkaitan dengan kesiapan belajar anak menuju jenjang SD.

**Tabel 1. Data Narasumber**

No.	Narasumber	Kode Narasumber
1.	Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Batu	TKN-KS
2.	Guru TK Negeri Pembina Kecamatan Batu	TKN-GR
3.	Kepala Sekolah TK Dahlia 01 Kecamatan Bumiaji	TKD-KS
4.	Guru TK Dahlia 01 Kecamatan Bumiaji	TKD-GR

Pengumpulan data dilaksanakan selama bulan November 2025, dengan menggunakan teknik observasi non partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi partisipatif pasif dilaksanakan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran, interaksi antara guru dan anak, suasana kelas, serta berbagai aktivitas yang mencerminkan implementasi Perwali No. 94 Tahun 2020 dalam konteks pembelajaran transisi menuju sekolah dasar.

Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan penelitian untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta praktik implementasi kebijakan pada masing-masing lembaga. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam.

Studi dokumentasi dilaksanakan dengan mempelajari dokumen kebijakan Perwali 94 Tahun 2020, program tahunan dan mingguan lembaga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), laporan kegiatan transisi PAUD ke SD, notulensi rapat, foto-foto kegiatan, buku induk siswa, serta bukti lain yang mendukung implementasi kebijakan di lapangan.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman & Saldana (2014), yang terdiri dari empat tahapan utama: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap pertama pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di kedua situs penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan, sedangkan wawancara direkam dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Sementara itu, data dokumentasi diperoleh dari berbagai dokumen lembaga yang berkaitan dengan

implementasi kebijakan Perwali 94 Tahun 2020.

Tahap kedua kondensasi data dilakukan melalui proses seleksi, pengodean, pengelompokan, dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian, yang terdiri dari: implementasi kebijakan, kesiapan belajar anak, faktor pendukung implementasi, serta faktor penghambat implementasi kebijakan. Selanjutnya tahap ketiga data disajikan dalam bentuk matriks, tabel, dan narasi tematik untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan perbedaan temuan antar situs.

Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti menafsirkan makna data yang telah disajikan dengan menghubungkannya dengan fokus penelitian dan kerangka konseptual yang digunakan. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses analisis dengan menelaah kembali konsistensi data, melakukan triangulasi sumber dan teknik, serta mengonfirmasi temuan melalui proses member checking dengan informan penelitian. Melalui proses tersebut diperoleh kesimpulan yang kredibel mengenai implementasi kebijakan PAUD dan implikasinya terhadap kesiapan belajar anak usia dini.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan kriteria *trustworthiness* yang meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Lincoln and Guba, 1985). *Credibility* dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari kepala sekolah dan guru pada kedua situs, serta

triangulasi teknik melalui kombinasi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Selain itu dilakukan *member checking* untuk mengonfirmasi kesesuaian interpretasi dengan narasumber dan pengumpulan data dilakukan hingga mencapai saturasi. *Transferability* diperkuat melalui penyajian deskripsi kontekstual yang rinci mengenai karakteristik lembaga dan dinamika implementasi kebijakan. Sedangkan *dependability* dijaga melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian serta diskusi dengan sejawat untuk memastikan konsistensi analisis. *Confirmability* dilakukan dengan menjaga transparansi jejak data dan mendasarkan setiap temuan pada bukti empiris berupa kutipan wawancara, hasil observasi, dan dokumen pendukung sehingga kesimpulan dapat ditelusuri kembali pada data lapangan.

## HASIL PENELITIAN

### a. Implementasi Kebijakan Perwali 94 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa disyahkannya Perwali 94 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan PAUD disambut baik pada kedua situs. Disebutkan oleh narasumber pada situs 2, bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan upaya nasional untuk memastikan setiap anak memperoleh fondasi Pendidikan yang kuat. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber TKN-KS mengenai hal tersebut:

Kalau masalah kebijakan wajib PAUD satu tahun itu memang sudah sejalan dengan upaya nasional untuk

memastikan bahwa setiap anak itu memperoleh fondasi pendidikan yang lebih kuat.

Pada pengimplementasian kebijakan narasumber menyebutkan secara normative bahwa pelaksanaannya adalah berfokus pada penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan ramah anak sesuai standar nasional. Peran lembaga PAUD digambarkan tidak hanya sebagai pelaksana administratif kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak dalam memastikan anak mengalami proses pendidikan yang berkesinambungan dan sesuai tahap perkembangan. Penjelasan tersebut, sesuai uraian dari TKD-GR berikut,

Yang pertama sih kami menyediakan layanan pendidikan bermutu dan ramah anak sesuai dengan standar nasional PAUD. Untuk yang kedua menyusun program transisi PAUD atau SD agar anak siap secara sosial, emosional dan akademik.

Pada situs 2 peran lembaga PAUD dipertegas yakni dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dengan menerima pendaftaran anak dari berbagai latar belakang, baik yang berasal dari kelompok bermain maupun tidak. Sikap inklusif ini mencerminkan dukungan lembaga terhadap mandat pemerintah, sekaligus memastikan tidak ada anak yang terhambat mengikuti PAUD. Narasumber TKN-GR menyampaikan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya TK Negeri Pembina harus tetap mendukung dari keputusan pemerintah sehingga kita tetap membuka pendaftaran untuk semua anak masyarakat Kota Batu. Baik itu dari basicnya anak itu dari kelompok

bermain ataupun tidak dari kelompok bermain kita terima. Selama kuotanya masih ada.

Dalam upaya menyediakan layanan yang bermutu dilakukan pengorganisasian sumber daya yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: pertama adalah optimalisasi kompetensi guru, karena harus memfasilitasi kebutuhan anak; kedua adalah mengoptimalkan fasilitas pendukung pembelajaran; ketiga adalah membangun sinergi dengan orang tua. Penjelasan mengenai hal tersebut, sebagaimana dikutip dari wawancara dengan narasumber pada situs 1 TKD-KS,

Yang pastinya yang pertama kita adalah mengoptimalkan kompetensi guru yang mana guru kan harus dapat memfasilitasi kebutuhan anak. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga adalah mengembangkan kerjasama dengan orang tua untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Narasumber pada situs 2 menambahkan pentingnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Penjelasan narasumber TKN-KS sehubungan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Kami sebagai kepala sekolah mempelajari, mensosialisasikan dan melibatkan orang tua dalam komunitas. Untuk intern, peningkatan wawasan guru dengan ikut pelatihan-pelatihan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Sehubungan dengan keterlibatan orang tua, pada kedua situs sudah cukup baik. Orang tua aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah, mendukung program-program

lembaga, serta menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan anak. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua bukan hanya berfokus pada perkembangan anak, melainkan juga pada pengembangan lembaga secara keseluruhan. Narasumber TKD-KS dari situs 1 menjelaskan:

Kalau untuk di lembaga kami sendiri, Alhamdulillah orang tua ini selalu terlibat aktif dalam kegiatan lembaga. Jadi kalau menurut saya, kolaborasi di lembaga kami dan orang tua ini sudah sesuai dalam rangka mempersiapkan anak-anak untuk memenuhi perkembangannya, siap masuk SD seperti itu.

Kemudian narasumber pada situs 2 juga menjelaskan orang tua berperan aktif dalam proses masa transisi PAUD ke SD, dalam bentuk paguyuban. Berikut adalah penjelasan dari narasumber TKN-GR:

Membuatlah paguyuban sekolah sebagai yang anggotanya orangtua untuk menyambungkan apa yang program di sekolah laksanakan itu tersampaikan juga di orangtua. Tetapi ada event-event tertentu yang kita melibatkan semua orangtua sehingga orangtua ini juga aktif juga untuk kegiatan anak-anak itu di sekolah dan merasa mengetahui juga perkembangan anakku seperti ini.

Aspek berikutnya yang juga diamati dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi dan koordinasi antara situs dengan SD di wilayah Kota Batu, yang ternyata belum terbangun secara sistematis. Padahal dalam Perwali 94 Tahun 2020 ada tuntutan untuk melaksanakan koordinasi intensif antara PAUD dan SD. Berikut penjelasan dari narasumber situs 1, TKD-KS:

Jadi sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut, kami memang belum koordinasi secara resmi dengan SD. Tapi kita hanya kadang sekedar obrol-obrol, ngomong-ngomong.

Pada situs 2 juga menghadapi masalah yang sama, yakni koordinasi dengan SD yang masih terbangun sistematis. Berikut dijelaskan oleh narasumber TKN-KS:

Sejauh ini SD di sekitar TK pembina ini saya kira kurang ada komunikasi atau koordinasi yang fokus atau khusus tentang transisi dari PAUD ke SD. Koordinasi hanya berupa pihak SD mempromosikan sekolahnya kepada TK.

Narasumber TKN-GR yang berasal dari situs 2 menambahkan mengenai adanya kesenjangan yang besar antara kondisi di TK dan SD, yang tidak pernah didiskusikan bersama. Memang ada forum guru TK dan SD, namun hubungannya bukan kolaboratif namun lebih ke hierarki, dimana guru TK merasa guru SD lebih tinggi posisinya dari mereka. Hal tersebut mengakibatkan tidak munculnya kolaborasi yang diharapkan. Berikut adalah kutipan wawancara dengan narasumber TKN-GR:

Karena apa yang kita rasakan saat ini, dari TK ke SD itu seperti ada jurang gitu. Jadi harus ada forum pemangku kepentingan, termasuk salah satunya lembaga, dinas, orang tua, dan pemda. Pernah ada tapi belum berjalan baik.

Kekurangan berikutnya pada implementasi kebijakan yang terungkap dari wawancara pada situs 1, yakni sosialisasinya yang kurang massif, dan bahkan kepala sekolah dan guru pada kedua situs tidak tahu mengenai kebijakan tersebut. Hal tersebut terungkap

berdasarkan wawancara dengan narasumber TKD-KS, sebagai berikut:

Kalau menurut saya kebijakan tersebut sangat bagus hanya saja tidak ada sosialisasi lanjutan setiap tahun. Sehingga kalau menurut saya masih kurang efektif ya. Jadi sebagian itu masyarakat ataupun kami di kalangan guru itu belum sepenuhnya memahami.

**b. Kesiapan Belajar Anak Usia Dini untuk Mengikuti Pembelajaran Di Jenjang Sekolah Dasar**

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan sehubungan kesiapan belajar anak usia dini, menunjukkan bahwa anak yang mengikuti PAUD minimal satu tahun sebagaimana direkomendasikan dalam kebijakan Perwali 94 Tahun 2020, lebih siap untuk masuk SD. Narasumber situs 1 TKD-KS menjelaskan bahwa hal tersebut didukung oleh kurikulum PAUD yang telah dilaksanakan pada lembaga. Hal tersebut sesuai penjelasan TKD-KS berikut:

Sepengetahuan saya untuk anak-anak yang lulusan dari kami, mereka yang mengikuti PAUD ini lebih siap untuk mengikuti memasuki SD dibandingkan dengan yang tidak. Karena mereka terbiasa dengan rutinitas seperti harus bangun pagi, kemudian jam 7 sudah harus berangkat.

Narasumber pada situs 2, juga menyatakan hal yang sama, bahwa anak yang mengikuti PAUD minimal satu tahun, akan lebih siap untuk masuk SD. Berikut penjelasan dari narasumber TKN-KS:

Ya, karena anak yang sudah masuk PAUD mempunyai rasa kemandirian dan sosial yang lebih baik dibanding anak-anak yang tidak masuk di PAUD.

Kemudian narasumber TKN-GR menambahkan:

Untuk anak-anak dari sekolah kami (situs 1), Saya kira sebagian besar, bahkan semua, itu sudah siap kalau mau melanjutkan ke SD. Kalau dipersentasekan, 95% beranilah.

Kurikulum yang dilaksanakan pada lembaga PAUD sebelum disyahkannya kebijakan Perwali 94 Tahun 2020 telah sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Seperti Kesiapan masuk SD tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan akademik seperti calistung, tetapi lebih pada kesiapan mental, kemandirian, regulasi emosi, serta kemampuan sosial anak. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh narasumber TKD-GR berikut:

Menurut saya kurikulum PAUD dirancang berdasarkan tahapan perkembangan anak usia dini, bukan berdasarkan target akademi.

Perihal yang sama disampaikan narasumber dari situs 2, bahwa kurikulum yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Berikut penjelasan dari narasumber TKN-KS:

Secara umum kurikulum PAUD saat ini sangat sesuai dengan kebutuhan anak usia dunia. Karena memprioritaskan perkembangan holistik bermain sebagai metode utama belajar secara fleksibilitas, bukan calistung.

Persiapan transisi PAUD ke SD dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pada situs 1 tahapan tersebut terdiri atas: pertama adalah memberikan pengertian kepada anak-anak, bahwa tahun depan sudah masuk SD; kedua mempersiapkan anak-anak mengenai

<i>Jurnal Warna : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia dini.</i>		
<i>Maret 2026 . Vol 11. No. 01</i>		
<i>Received: Februari 2026</i>	<i>Accepted: Februari 2026</i>	<i>Published: Maret 2026</i>
<i>Article DOI: 10.24903/jw.v11i1.2336</i>		

kemandirian dasar, seperti pergi ke kamar mandi sendiri; ketiga adalah memberi penguatan, bahwa ketika di SD harus lebih mandiri; keempat melakukan proyek kunjungan ke SD, agar anak-anak ada gambaran jelas mengenai kondisi di jenjang sekolah berikutnya; kemudian yang kelima mengajak orang tua dalam persiapan tersebut, sehingga ada sinergi antara guru, siswa, dan orang tua. Penjelasan mengenai hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan narasumber TKD-KS, sebagai berikut:

Yang pertama, pastinya kita memberikan pengertian pemahaman kepada anak bahwa tahun depan mereka sudah tidak lagi di kita (PAUD), tapi mereka sudah menjadi anak SD, maka harus banyak perubahan. Jadi mereka harus bisa adaptasi dengan lingkungan yang ada di SD nanti, dan pastinya itu kita mengajar anak-anak ini untuk selalu mandiri seperti toilet training.

Pada situs 2 meskipun narasumber tidak menyebutkan langkah demi langkah yang mendetail, persiapan untuk masuk SD yang dilakukan hamper sama. Lembaga PAUD melakukan persiapan terutama berhubungan dengan aspek sosial, emosional, dan kemandirian anak, serta mengajak orang tua untuk bekerja sama dalam proses tersebut. Narasumber TKN-KS bahkan menyatakan proses tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun Pelajaran, sebagai berikut:

Ya, pada awal tahun masuk, ketika anak mulai masuk sekolah, akan ada masa pengenalan lingkungan atau juga yang disebut MPLS, yang bertujuan untuk kematangan emosi, sosial dan kemandirian. Untuk tingkat pengetahuan, kegiatan bermain

mengarah pada pengenalan literasi dan numerasi awal.

Kemudian untuk pelibatan orang tua pada situs 2 disampaikan oleh narasumber TKN-GR, sebagai berikut:

Selain itu kita komunikasikan juga dengan orang tua agar di rumah pun apa yang dibiasakan anak di sekolah itu bersambung dengan orang tua yang di rumah.

Sebagaimana pada situs 1, PAUD pada situs 2 juga melakukan kunjungan ke SD. Mengenai kegiatan tersebut dijelaskan oleh narasumber TKN-GR sebagai berikut:

Memperkenalkan lingkungan SD karena ada salah satu SD yang mengundang untuk datang ke SD tersebut. Tujuannya adalah mengenal lingkungan di SD.

Guna memutuskan siswa layak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, dilakukan penilaian atau ditetapkan standar tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber pada situs 1, TKD-KS berikut:

Yang pertama kami melakukan observasi terhadap anak selama proses pembelajaran untuk mengetahui setiap anak. Setelah mengetahui hasil dari observasi tersebut, kami pastinya bekerjasama dengan guru.

Kemudian untuk aspek yang diutamakan untuk menentukan anak layak ke SD adalah kematangan sosial, kemudian emosional, kemandirian, baru kemudian akademis. Berikut penjelasan dari narasumber TKD-KS:

Indikator biasanya yang kami jadikan tolak ukur itu pertama adalah kemampuan sosial anak. Karena dari kemampuan sosial tersebut, anak-anak itu pasti akan bisa membangun

kemampuan emosional, kemandirian baru akademisnya. Setelah dia nyaman, dia akan mandiri melakukan apa pun sehingga kemampuan akademis mereka dapat tercapai dengan baik.

Narasumber TKD-GR menambahkan adanya form penilaian untuk kelayakan anak masuk SD, yakni menggunakan lembar cap perkembangan. Berikut penjelasannya:

Menggunakan lembar cap yang perkembangan.

Pada situs 2 juga menjelaskan untuk menilai kesiapan anak masuk SD, yang diutamakan adalah aspek sosial-emosional dan kemandirian. Sedangkan untuk aspek kognitif diajarkan sambil bermain. Secara khusus narasumber pada situs 2 menyatakan bahwa pengamatan atau evaluasi dilaksanakan saat anak berinteraksi, menyelesaikan tugas, saat bermain, dan saat suasana santai, kemudian dilakukan pula wawancara secara pribadi dengan orang tua. Evaluasi dilakukan meliputi 6 fondasi perkembangan dasar. Narasumber TKN-KS menyampaikan sebagai berikut,

Pada saat kita mengamati perilaku anak saat berinteraksi, dalam menyelesaikan tugas, atau pada saat bermain suasana santai atau memiliki kemampuan sosial-emosional mereka, konsentrasi mereka, kemandirian secara alami, serta wawancara dengan orang tua secara pribadi. Kemudian evaluasinya meliputi 6 fondasi perkembangan dasar.

Tantangan dalam pelaksanaan persiapan masa transisi umumnya berasal dari siswa PAUD yang merasa nyaman di sekolah PAUD, kecemasan karena merasa takut dengan anak SD ada yang nakal, kemudian juga dukungan orang tua. Pada aspek orang tua,

seringkali sekolah telah mengajari tentang kemandirian, namun di rumah masih dimanjakan. Termasuk juga orang tua lebih resah karena masalah akademis, bukan kemandirian siswa. Penjelasan tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber pada situs 1 yakni TKD-KS, sebagai berikut:

Tantangannya yang pertama adalah kesiapan anak. Terkadang anak ini terlalu nyaman dengan lingkungan dan guru yang ada di TK. Kemudian kemandirian anak, karena berbeda karakter setiap anak. Ada anak-anak yang memang sudah siap secara emosional, secara kemandirian.

Perihal yang menjadi tantangan pula menurut narasumber pada situs 1 adalah miskonsepsi orang tua mengenai penguasaan calistung. Orang tua menganggap bahwa kriteria untuk bisa masuk SD hanya berdasarkan kemampuan calistung. Mengenai hal tersebut dijelaskan sebagai berikut oleh TKN-KS:

Tantangan yang sering kali kita hadapi, miskonsepsi orang tua untuk mengajarkan calistung secara instan dan intensif. Kesulitannya beradaptasi dengan rutinitas aturan dan lingkungan sosial SD yang lebih formal.

Oleh karenanya narasumber pada situs 2, menyarankan untuk adanya komunikasi dengan SD bahwa calistung bukan syarat utama untuk masuk ke SD. Berikut uraian wawancara dengan narasumber TKN-GR:

Jadi kalau itu tantangannya itu pemahaman lah ke orang tua bahwa itu tidak sebagai hal yang paling utama untuk bisa menulis berhitung karena orang tua hanya terpaku ke itu kemampuan calistung itu sehingga kemampuan lainnya itu terabaikan oke. Oh ini loh draftnya itu seperti ini sehingga meyakinkan orang itu

tidak terlalu khawatir anak yang tidak bisa membaca.

**c. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perwali 94 Tahun 2020**

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan terdiri dari beragam hal, mulai dari sosialisasi hingga sarana prasarana. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah ketersediaan PAUD yang merata di seluruh Kota Batu. Sehingga masyarakat mudah dalam menjangkau layanan tersebut. Selain itu orang tua PAUD yang umumnya adalah generasi milenial dan gen-Z cenderung proaktif mencari lembaga PAUD meskipun lokasinya tidak dekat dengan rumah. Berikut penjelasan dari narasumber pada situs 1 yakni TKD-KS:

Kalau menurut saya tidak ada kendala. Karena setiap dusun, setiap RW, kalau di Kota Batu ini saya rasa kita sudah memiliki PAUD. Tidak hanya TK, tapi kelompok bermain rata-rata, warga ini masyarakat sudah bisa menjangkau, dan melek pendidikan juga. Walaupun di RW-nya, di rumah terdekat tidak ada PAUD, tapi sekarang orang tua, generasi milenial, gen-Z atau apa. Mereka itu sudah bukan menjadi keterbatasan, walaupun tidak ada PAUD di desa saya, tidak ada PAUD di dusun saya. Tapi mereka bisa mencari PAUD lain atau mau mendatangi untuk mengantarkan anak-anak ke PAUD lain.

Narasumber pada situs 2 juga sepakat bahwa akses PAUD di Kota Batu cukup baik. Berikut adalah penjelasannya:

Akses PAUD. Kalau sebagian besar itu tidak ada kendala, karena sebagian besar masyarakat Kota Batu itu bisa mengakses PAUD. Ada pun, jika ada

anak yang tidak sampai bisa masuk PAUD, kemungkinan itu ada masalah dengan intern keluarga.

Tantangan dalam implementasi kebijakan adalah konsistensi kebijakan, pemenuhan sarana prasarana, keterbatasan internal lembaga, dan persepsi masyarakat tentang PAUD. Untuk sarana prasarana dijelaskan oleh narasumber pada situs 1 yakni TKD-GR harus memenuhi persyaratan aman, sehat, dan sesuai usia atau tumbuh kembang anak usia dini. Berikut kutipan wawancaranya,

Nah ini harus dukungannya itu dari pemerintah daerah dan kebijakan yang konsisten. Sarana prasarana yang aman, sehat dan sesuai usia anak. Harus sesuai tahap perkembangannya.

Dalam hal persepsi masyarakat adalah mengenai PAUD yang dianggap sebagai layanan yang tidak wajib. Sehingga kemudian beberapa orang tua memilih langsung memasukkan anak ke SD tanpa mengikuti PAUD. Perspektif ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan pemenuhan terhadap ketentuan wajib satu tahun pra-SD. Hal tersebut disampaikan narasumber TKD-KS berikut,

Tapi sebagian masyarakat itu mereka taunya tidak pakai PAUD, tidak pakai TK, tidak masalah. Anak-anak langsung masuk SD. Kayak menge-sampingkan.

Pada situs 2 juga menghadapi masalah yang sama yakni kurangnya sarana prasarana, kesulitan koordinasi dan beban administrasi yang tinggi. Berikut penjelasan dari narasumber TKN-KS:

Secara umum tantangan yang sering kali dihadapi di lembaga kami, adalah beban administrasi, sarana prasarana yang belum memadai, kadangkala

keterlibatan orang tua secara umum itu masih ada kendala, mengkoordinasi guru-guru nya mungkin guru-guru nya di sini jumlahnya memang banyak sekali ya, dan gaji guru yang belum sesuai dengan UMR.

Tantangan lainnya adalah perubahan yang terus terjadi dan menuntut guru untuk melakukan penyesuaian. berikut disampaikan oleh narasumber TKN-GR:

Tantangannya tentu saja kegiatan pembelajaran mesti berubah. Kita harus mengikuti perkembangan jaman, perkembangan, kebijakan regulasi nasional. Juga ilmu-ilmu baru yang tentunya untuk kegiatan belajar yang lebih tepat untuk anak-anak itu seperti apa, kan kita harus mengikuti itu.

#### **d. Strategi Untuk Mendukung Implementasi Kebijakan**

Strategi yang direkomendasikan oleh narasumber baik pada situs 1 dan 2 untuk mendukung implementasi kebijakan diantaranya: menjalin kolaborasi dengan setiap stakeholder yang berhubungan dengan penyelenggaraan PAUD, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Mengenai strategi kolaborasi, narasumber situs 1 menjelaskan penting untuk menjalin kolaborasi dengan setiap stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD wajib minimal satu tahun sebelum masuk SD. Kemudian seharusnya ada proses refleksi dan evaluasi atas kebijakan tersebut, karena selama ini menurut narasumber proses tersebut belum ada. Mengenai hal tersebut, disampaikan oleh narasumber TKD-KS sebagai berikut,

Strateginya yang pertama adalah kolaborasi setiap stakeholder, berjalan beriringan dengan lembaga. Jadi ketika

mereka mengeluarkan kebijakan, harus ada umpan balik. Ini kesannya berarti hanya ada regulasinya, belum ada pengawasan. Belum refleksi, evaluasi dan refleksi dari terlaksananya implementasi ini belum ada.

Sedangkan narasumber dari situs 2, yakni TKN-KS menjelaskan sebagai berikut:

Sebagai pemimpin, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk menyusun visi, misi dan tujuan yang terarah. Tetap melakukan kolaborasi dengan orang tua, dengan komite, dengan stakeholder yang ada untuk tetap dan terus berinovasi dan berkomitmen dalam tim.

Dalam hal sosialisasi dan edukasi dijelaskan oleh narasumber TKD-GR dari situs 1 sebagai berikut:

Yang pertama sih penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru PAUD.

Narasumber pada situs 2 kemudian juga memberikan tambahan, bahwa seharusnya sebuah kebijakan harus diupayakan untuk terus berjalan, sekaligus dilakukan control dan evaluasi program. Berikut adalah penjelasan dari narasumber TKN-GR:

Yang saya harapkan, pemerintah ketika sudah membuat kebijakan ya diteruskan. Ini bagus kebijakannya, tetapi seperti berhenti di tengah jalan karena tidak ada kontrol atau keberlanjutan evaluasi program, keberjalanan program itu saja belum terlaksana. Dan mungkin juga terlalu banyak program, sehingga sampai terabaikan.

Secara khusus kemudian narasumber pada situs 1 yang merupakan lembaga PAUD swasta menyatakan bahwa membutuhkan dukungan dari pemerintah dari segala aspek.

Narasumber pada situs 1 merasa sebagai sekolah swasta kecil, sehingga tidak mendapat cukup dukungan dari pemerintah, sehingga kesulitan dalam memoles tampilan sekolahnya. Karena umumnya wali murid tertarik pada sebuah lembaga PAUD karena penampilannya. Berikut yang disampaikan oleh narasumber TKD-KS:

Apalagi untuk sekolah swasta yang kecil. Kalau untuk sekolah swasta yang besar, pasti dari sarana-prasarana sudah di cover oleh yayasan. Tapi bagaimana dengan kami, sekolah swasta yang kecil. Kalau negeri pasti sarana-prasarana sudah memadai. Karena setiap tahun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan alokasi umum khusus.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perwali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan PAUD secara normatif telah diterima dengan baik oleh satuan PAUD. Namun, jika dianalisis menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III (1980), efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh variasi pada empat komponen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur koordinasi.

### a. Komunikasi Kebijakan: Kelemahan pada Sosialisasi dan Koordinasi

Komponen komunikasi kebijakan tampak menjadi aspek yang paling lemah. Hal tersebut ditunjukkan dengan lemahnya sosialisasi, yang berdampak pada rendahnya pemahaman guru dan orang tua terhadap

substansi kebijakan, khususnya kewajiban PAUD satu tahun pra-SD. Kelemahan pada koordinasi tampak pada kolaborasi antara PAUD dan SD belum terbangun secara sistematis. Hubungan yang terjadi cenderung bersifat administratif atau promosi sekolah, bukan dialog pedagogis mengenai kesiapan anak dan kesinambungan pembelajaran.

Temuan di atas mengenai pentingnya komunikasi berupa sosialisai kebijakan, sejalan dengan hasil penelitian oleh Viennet & Pont (2017) yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap kebijakan tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh proses perumusan, pelibatan pemangku kepentingan, dan efektivitas sosialisasi. Kemudian penelitian oleh Justiawal & Asmanurhidayani (2022) meski pada bidang berbeda, yakni kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan lemahnya sosialisasi mengakibatkan turunnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Guna mengatasi hambatan komunikasi ini, Niederdeppe et al., (2021) menyarankan strategi sosialisasi yang tepat dalam implementasi kebijakan.

Pada lemahnya koordinasi dengan SD, sejalan dengan penelitian di Islandia yang dilakukan oleh Jónsdóttir et al., (2025), bahwa koordinasi PAUD dengan SD hanya pada proyek terbatas, seperti pengenalan sekolah.

### b. Sumber Daya dan Kepemimpinan: Faktor Penguat Implementasi

Dari sisi sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru, dukungan sarana-prasarana, serta manajemen

internal lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan.

Pada kedua situs peran kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat transformatif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Kepala sekolah berperan dalam perencanaan program yang inklusif, penguatan kapasitas guru, serta pengelolaan manajemen internal lembaga. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Gibbs, (2022) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pada PAUD sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian Arifin (2011) dan Arifin et al. (2018) juga menegaskan bahwa kepala sekolah berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator program pendidikan. Kepemimpinan transformatif, yang menekankan pengaruh relasional, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual, terbukti mampu memperkuat implementasi kebijakan melalui peningkatan komitmen dan kolaborasi internal maupun eksternal (Maldonado & Goll, 2020; Saad Alessa, 2021).

#### **c. Disposisi Pelaksana: Penerimaan Positif**

Berdasarkan temuan pada kedua situs penelitian, disposisi pelaksana menunjukkan kecenderungan positif terhadap kebijakan. Narasumber kedua situs menyatakan bahwa kebijakan wajib PAUD satu tahun pra-SD sejalan dengan upaya nasional dalam memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini. Hal ini tercermin dalam komitmen membuka akses seluas-luasnya bagi anak, termasuk menerima peserta didik dari berbagai latar belakang. Temuan ini sejalan dengan banyak

penelitian terdahulu, salah satunya oleh Kertati (2021) mengenai kebijakan PAUD di Kota Semarang yang menunjukkan penerimaan positif. Adanya penerimaan normatif dan dukungan profesional terhadap kebijakan tersebut, menurut Sager dan Gofen (2022) merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Hasil penelitian, juga menunjukkan bahwa disposisi positif tersebut belum sepenuhnya diiringi pemahaman mendalam terhadap substansi Perwali. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerimaan sikap dan penguasaan substansi kebijakan, sebagaimana banyak terjadi pada implementasi kebijakan pada bidang pendidikan. Seperti pada penelitian oleh Manyengo (2025) pada kebijakan guru relawan di sekolah menengah yang menunjukkan bahwa Kepala Sekolah tidak memahami adanya pedoman nasional untuk program tersebut. Sehingga kemudian Viennet dan Pont (2017) menjelaskan bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada konsistensi komunikasi dan internalisasi kebijakan.

#### **d. Struktur Koordinasi: Pengorganisasian, Sarana prasarana, Dukungan Orang Tua**

Dalam hal struktur koordinasi, pengorganisasian lembaga menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi kebijakan, yang ditunjukkan melalui kejelasan struktur tugas, manajemen sumber daya manusia, dan dukungan sarana-prasarana. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian oleh Sager & Gofen (2022) yang menyatakan

struktur tugas yang jelas memungkinkan setiap aktor memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses implementasi kebijakan. Sementara manajemen SDM yang adaptif berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan PAUD sebagaimana dibuktikan dalam penelitian oleh Brandl et al., (2022) dan Marlina et al., (2022). Dukungan sarana-prasarana, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam regulasi, telah terakomodasi dalam pengaturan tempat penyelenggaraan dan pembiayaan PAUD, dan berkontribusi terhadap keberhasilan layanan pendidikan anak usia dini, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian Maizah & Ratnawati (2024) dan Wahyuni & Supriyono (2019).

Partisipasi orang tua terbukti menjadi faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan dan kesiapan belajar anak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Barnett et al., (2020) yang menemukan bahwa keterlibatan orang tua pada ECE akan meningkatkan aktivitas belajar dan kesiapan akademik. Selain itu juga menguatkan konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama pendidikan anak (Sukarman, 2018). Sinergi antara pendidikan di rumah dan di sekolah berperan penting dalam membangun konsistensi nilai, kemandirian, serta regulasi diri anak (Agus et al., 2020). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian orang tua masih memiliki pemahaman terbatas tentang fungsi PAUD, yang berdampak pada pola asuh yang tidak selaras dengan tujuan pengembangan anak usia dini.

#### **e. Implementasi Kebijakan dan Kesiapan Belajar Anak**

Dari sisi kesiapan belajar, PAUD terbukti berperan signifikan dalam mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar, terutama pada aspek non-akademik seperti kemandirian, regulasi emosi, dan keterampilan sosial. Kurikulum PAUD pada kedua situs telah selaras dengan prinsip kesiapan anak masuk SD bahkan sebelum kebijakan diberlakukan, sehingga Perwali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2020 berfungsi sebagai penguat praktik yang telah berjalan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ansari et al. (2021) dan Magnuson et al. (2004) yang menunjukkan bahwa anak yang mengikuti PAUD memiliki kesiapan transisi yang lebih baik. Apalagi ketika pembelajaran dilaksanakan berbasis bermain dan pengalaman langsung (Oskar et al., 2025).

Pendampingan masa transisi PAUD ke SD dilaksanakan secara terencana dan berjenjang melalui pembiasaan, kolaborasi dengan orang tua, serta kegiatan pengenalan lingkungan SD, termasuk kunjungan sekolah. Strategi ini sejalan dengan temuan López dan Benner (2025) yang menekankan pentingnya program transisi terstruktur, kolaborasi multipihak, pendekatan berpusat pada anak, serta pemantauan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan utama transisi berasal dari faktor eksternal, khususnya pola asuh orang tua yang tidak selaras dengan pendekatan PAUD, serta ketidaksinambungan metode pembelajaran PAUD–SD (Degli Esposti & Cigala, 2025; Morawska et al., 2024).

**f. Collaborative Governance sebagai Strategi Penguatan**

Berdasarkan keseluruhan temuan, strategi utama yang direkomendasikan untuk mengatasi hambatan dan memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan adalah penerapan *collaborative governance*. Kolaborasi antara pemerintah, satuan PAUD, pendidik, orang tua, dan masyarakat memungkinkan terwujudnya keselarasan kepentingan, tanggung jawab bersama, serta mekanisme koordinasi yang berkelanjutan Ansell & Gash, (2007); Liu et al. (2025). Penelitian terdahulu pada penerapan strategi *collaborative governance* pada ECE seperti yang dilakukan oleh Ye (2024), menunjukkan bahwa strategi tersebut efektif untuk mendukung suksesnya kebijakan. Dengan pendekatan *collaborative governance*, Perwali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi normatif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung kesiapan belajar anak usia dini secara holistik dan berkelanjutan.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perwali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2020 telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat layanan PAUD dan mendukung kesiapan belajar anak, terutama ketika didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah yang transformatif, pengorganisasian lembaga yang jelas, serta

keterlibatan aktif orang tua dan pemangku kepentingan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan urgensi PAUD semakin merata, sekaligus mendorong terbentuknya mekanisme koordinasi yang lebih sistematis antara PAUD dan SD untuk menjamin kesinambungan proses transisi. Ke depan, optimalisasi peran pemerintah daerah, peningkatan kapasitas pendidik, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta penataan pembiayaan dan mutu layanan PAUD yang lebih merata perlu terus dikembangkan agar kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai regulasi formal, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesiapan belajar anak usia dini secara holistik dan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan pendidikan pada level pemerintah daerah, khususnya dalam konteks PAUD. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, kapasitas kepemimpinan lembaga, ketersediaan sumber daya, serta tingkat koordinasi antarjenjang pendidikan. Dengan demikian, implementasi kebijakan PAUD dapat dipahami sebagai proses yang bersifat ekosistemik yang melibatkan interaksi antara struktur kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta dukungan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi kebijakan PAUD secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak. Kedua, perlu dikembangkan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis antara lembaga PAUD dan SD, misalnya melalui forum komunikasi atau program transisi bersama untuk memastikan kesinambungan proses pembelajaran anak. Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat program peningkatan kapasitas pendidik PAUD, khususnya dalam pengembangan pembelajaran yang mendukung kesiapan belajar anak secara holistik. Keempat, diperlukan penguatan dukungan pembiayaan dan pemerataan mutu layanan PAUD agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih optimal di berbagai lembaga PAUD.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka pemerintah daerah perlu untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan melalui peningkatan sosialisasi kebijakan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pembentukan forum komunikasi formal antara PAUD dan SD guna mendukung keberhasilan masa transisi PAUD ke SD secara lebih optimal. Kemudian untuk sekolah baik PAUD maupun SD perlu untuk melakukan sosialisasi bahwa keterampilan baca tulis dan hitung bukan merupakan prasyarat wajib untuk memasuki jenjang SD. Strategi yang disarankan adalah *collaborative*

*governance*, sehingga seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD perlu untuk berperan aktif dalam proses implementasi kebijakan. Kemudian untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektifitas implementasi kebijakan. Sehingga didapat data kuantitatif yang mendukung penelitian ini, bahwa kebijakan memperkuat posisi atau pelaksanaan PAUD.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, C., Cahyanti, P. A. B., Widodo, B., Yulia, Y., & Rochmiyati, S. (2020). *Cultural-Based Education of Tamansiswa as a Locomotive of Indonesian Education System* (pp. 471–486). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-15604-6\\_29](https://doi.org/10.1007/978-3-030-15604-6_29)
- Aivalli, P., Dada, S., Gilmore, B., Srinivas, P. N., & De Brún, A. (2025). Power dynamics and intersectoral collaboration for health in low- and middle-income countries: a realist review. *Health Policy and Planning, 40*(6), 661–683. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaf022>
- Al Munawaroh, Pebrienti Siregar, Rahmadani Rahmadani, & Linda Yarni. (2023). Perkembangan Usia Dini (Masa Kanak-Kanak Awal). *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS), 2*(1), 291–303. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i1.1277>
- Alvarado-Suárez, M. A., & Acosta-González, H. N. (2022). The effects of an early childhood education care program on child development as a function of length of exposure in Ecuador. *International Journal of Educational Development, 89*, 102559. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102559>
- Ansari, A., Pianta, R. C., Whittaker, J. E., Vitiello, V., & Ruzek, E. (2021). Enrollment in public-prekindergarten and school readiness skills at kindergarten entry: Differential associations by home language, income, and program characteristics. *Early Childhood Research Quarterly, 54*, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.07.011>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Apriliyanti, R. N. (2022). Kesiapan Belajar Anak TK dan SD Kelas 1 di Sekolah Bogor Raya Ditinjau dari Faktor Perkembangan Fisik dan Motorik, Kognitif, Bahasa dan Sosial Emosional. *Jurnal Teropong Pendidikan*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.19166/jtp.v2i1.5326>
- Arifin, I. (2011). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan PAUD Unggulan Nasional. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang*, 18(1), 29–35.
- Arifin, I., Juharyanto, J., Bafadal, I., & Kartini, H. (2018). Learning Innovation in Strengthening Higher Order Thinking Skill in the Laboratory Elementary School. *Proceedings of the 3rd International Conference on Educational Management and Administration (CoEMA 2018)*. <https://doi.org/10.2991/coema-18.2018.39>
- Atashbahar, O., Sari, A. A., Takian, A., Olyacemanesh, A., Mohamadi, E., & Barakati, S. H. (2021). Integrated early childhood development policy in Iran: a qualitative policy process analysis. *BMC Public Health*, 21(1), 649. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10646-7>
- Barnett, M. A., Paschall, K. W., Mastergeorge, A. M., Cutshaw, C. A., & Warren, S. M. (2020). Influences of Parent Engagement in Early Childhood Education Centers and the Home on Kindergarten School Readiness. *Early Childhood Research Quarterly*, 53, 260–273. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.05.005>
- Brandl, J., Keegan, A., & Kozica, A. (2022). When less is more: HRM implementation, legitimacy and decoupling. *Human Resource Management Journal*, 32(1), 247–260. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12388>
- Ceah, A., Kong, K., Heng, J. A., Ereky-Stevens, K., & Siraj, I. (2026). Assessing school readiness domains in a large cohort of refugee children: Validation and links with family factors. *Studies in Educational Evaluation*, 88, 101557. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2025.101557>
- Degli Esposti, C., & Cigala, A. (2025). Children's Experience of Transition from Preschool To Primary School: A Scoping Literature Review. *Early Childhood Education Journal*. <https://doi.org/10.1007/s10643-025-02019-1>
- Duncan, R. J., Duncan, G. J., Stanley, L., Aguilar, E., & Halfon, N. (2020). The kindergarten Early Development Instrument predicts third grade academic proficiency. *Early Childhood Research Quarterly*, 53, 287–300. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.05.009>
- Edward, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Ernst, J. R., Purpura, D. J., Schmitt, S. A., & Duncan, R. J. (2025). Differentiation effects in school readiness skills across the transition from preschool to kindergarten. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 101, 101889. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2025.101889>
- Ghandour, R. M., Moore, K. A., Murphy, K., Bethell, C., Jones, J. R., Harwood, R., Buerlein, J., Kogan, M., & Lu, M. (2019). School Readiness among U.S. Children: Development of a Pilot Measure. *Child Indicators Research*, 12(4), 1389–1411. <https://doi.org/10.1007/s12187-018-9586-8>
- Gibbs, L. (2022). Leadership emergence and development: Organizations shaping leading in early childhood education. *Educational Management Administration & Leadership*, 50(4), 672–693. <https://doi.org/10.1177/1741143220940324>
- Ha, T. T. T., Lien, V. T. T., & Hang, T. T. (2025). Early childhood education through a child-centered approach: Theoretical foundations and key issues. *Macrolinguistics and Microlinguistics*, 6(2), 74–84. <https://doi.org/10.21744/mami.v6n2.40>
- Hidayati, I., Susanti, M., Anggreiny, N., & Maputra, Y. (2023). Evaluating factors affecting the readiness of children entering elementary school: the perspective of elementary school teachers. *Jurnal JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.26555/jpsd.v10i1.a26077>
- Jónsdóttir, F., Dockett, S., & Einarsdóttir, J. (2025). Transition from preschool to primary school for diverse groups of children in Iceland. A praxeological study. *Education 3-13*, 53(2), 198–211. <https://doi.org/10.1080/03004279.2023.2170186>
- Justiawal, M., & Asmanurhidayani, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 145–154. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i1.315>
- Kertati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Di Kota Semarang. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2163>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publication Inc.

- Liu, W., Li, X., & Li, G. (2025). The Contributions of Philosophy of Science in Science Education Research: a Literature Review: Wencheng Liu et al. *Science & Education*. <https://doi.org/10.1007/s11191-023-00485-w>
- López-Figueroa, J. C., Ochoa-Jiménez, S., Palafox-Soto, M. O., & Sujeý Hernandez Munoz, D. (2025). Digital Leadership: A Systematic Literature Review. *Administrative Sciences*, 15(4), 129. <https://doi.org/10.3390/admsci15040129>
- López, B. A., & Benner, A. D. (2025). Challenges in the transition to kindergarten and children's well-being through elementary school: Do school transition supports matter? *Early Childhood Research Quarterly*, 71, 193–204. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2025.01.001>
- Lu, A., & Matheny, K. T. (2026). Equal Inputs, Unequal Outputs: How Capacity Limits Policy Implementation. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 48(1), 189–213. <https://doi.org/10.3102/01623737241310832>
- Magnuson, K. A., Meyers, M. K., Ruhm, C. J., & Waldfogel, J. (2004). Inequality in Preschool Education and School Readiness. *American Educational Research Journal*, 41(1), 115–157. <https://doi.org/10.3102/00028312041001115>
- Maizah, M., & Ratnawati, R. (2024). Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Sebagai Penunjang Efektivitas Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 7(1), 49–59. <https://doi.org/10.31539/alignment.v7i1.9537>
- Maldonado, C., & Goll, S. (2020). Transformational Leadership. In *The SAGE Encyclopedia of Higher Education*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781529714395.n591>
- Manyengo, P. (2025). Between Policy and Practice: Unveiling School Leaders' Unawareness of Volunteer Teacher Guidelines. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 7(3), 236–248. <https://doi.org/10.52627/managere.v7i3.848>
- Marlena, M., Rakhmawati, H., & Wahyuni, N. D. (2022). Influence of Accountability of Village Fund Allocation Management and Community Participation on Village Development. *Proceedings of the International Seminar on Business, Education and Science*. <https://doi.org/10.29407/int.v1i1.2634>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Morawska, A., Mitchell, A. E., Etel, E., Armstrong, R., McAuliffe, T., Ma, T., McBryde, C., & Johnston, L. M. (2024). A Systematic Review of Parents' Experiences during their Child's Transition to School. *Early Childhood Education Journal*. <https://doi.org/10.1007/s10643-024-01780-z>
- Muthanna, A., & Sang, G. (2023). A Conceptual Model of the Factors Affecting Education Policy Implementation. *Education Sciences*, 13(3), 260. <https://doi.org/10.3390/educsci13030260>
- Niederdeppe, J., Winett, L. B., Xu, Y., Fowler, E. F., & Gollust, S. E. (2021). Evidence-Based Message Strategies to Increase Public Support for State Investment in Early Childhood Education: Results from a Longitudinal Panel Experiment. *The Milbank Quarterly*, 99(4), 1088–1131. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.12534>
- Nolan, A., & Molla, T. (2023). Equity in early childhood education: policy framing, translation and enactment. In *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)* (pp. 93–98). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.04098-7>
- Nurbaiti, N., Apriyantoro, N. H., Dumaris, C. H., Prawestri, R., Rizqi, M., & Supriyoni, P. (2023). Literasi Kognitif Neurosains Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Pembelajaran Matematika. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(9), 3503–3513. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i9.10654>
- Nuryana, A., Setya Yuwana, Rachmawati Novaria, & Handoko, V. R. (2025). LAMDIK Policy and Its Impact on Education Quality. *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 15(1), 99–113. <https://doi.org/10.31289/jap.v15i1.14306>
- Oskar, R., Khairunnisa, F. I., Harto, K., & Suryana, E. (2025). Early Childhood Development (Physical, Intellectual, Emotional, Social, Moral and Religious) and Its Implications toward Early Childhood Education. *Journal of Social Work and Science Education*, 6(2), 680–690. <https://doi.org/10.52690/jswse.v6i2.1151>
- Pangestuti, R., Kadiyono, A. L., Agustiani, H., & Cahyadi, S. (2026). Influences of sociocultural factors on Indonesian children's self-regulation and its effects on school readiness. *Acta Psychologica*, 264, 106393. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2026.106393>
- Piasta, S. B., Shea, Z., Hudson, A. K., Shen, Y.,

- Logan, J. A. R., Zettler-Greeley, C. M., & Lewis, K. (2025). Initial Skills Predict Preschoolers' Emergent Literacy Development but Do Not Moderate Response to Intervention. *Infant and Child Development*, 34(3). <https://doi.org/10.1002/icd.70022>
- Pirskanen, H., Jokinen, K., Karhinen-Soppi, A., Notko, M., Lämsä, T., Otani, M., Meil, G., Romero-Balsas, P., & Rogero-García, J. (2019). Children's Emotions in Educational Settings: Teacher Perceptions from Australia, China, Finland, Japan and Spain. *Early Childhood Education Journal*, 47(4), 417–426. <https://doi.org/10.1007/s10643-019-00944-6>
- Poerwati, C. E., Suastra, I. W., Atmaja, A. W. T., & Tika, I. N. (2025). Urgensi Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pendidikan. *EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 4(4), 463–469. <https://doi.org/10.51878/educational.v4i4.4085>
- PP No 12 Tahun 2025, Pub. L. No. 12 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/prpres-no-12-tahun-2025>
- Rao, N., Yang, Y., Su, Y., & Cohnsen, C. (2023). Promoting Equity in Access to Quality Early Childhood Education in China. *Children*, 10(10), 1674. <https://doi.org/10.3390/children10101674>
- Rodríguez-Rabassa, M., Muniz-Rodríguez, K., Appleton, A. A., Borges-Rodríguez, M., Ruiz-Raices, N. E., Reyes-Santiago, F. J., Olivieri-Ramos, O., & Alvarado-Domenech, L. I. (2025). Ready for School: A Multi-Dimensional Approach to School Readiness Assessment in Hispanic Children from Puerto Rico. *Behavioral Sciences*, 15(7), 957. <https://doi.org/10.3390/bs15070957>
- Rokhmah, N., & Hambali, H. (2024). Penggunaan Media Permainan Pohon Angka dalam Menstimulus Kemampuan Mengenal Angka Anak Usia 4-5 Tahun di Pos PAUD Harapan Bangsa Desa Wonosari. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1), 278–283. <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.227>
- Saad Alessa, G. (2021). The Dimensions of Transformational Leadership and Its Organizational Effects in Public Universities in Saudi Arabia: A Systematic Review. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.682092>
- Sager, F., & Gofen, A. (2022). The polity of implementation: Organizational and institutional arrangements in policy implementation. *Governance*, 35(2), 347–364. <https://doi.org/10.1111/gove.12677>
- Sukarman, S. (2018). REAKTUALISASI KONSEP TRI PUSAT PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelegualitas*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v5i1.1972>
- Teleková, R., Marcinekova, T., Tirpáková, A., & Gonda, D. (2023). Adaptation Difficulties of Children at the Beginning of School Attendance Based on the Optics of Primary School Teachers. *Children*, 10(2), 410. <https://doi.org/10.3390/children10020410>
- Vargas-Barón, E. (2019). Early childhood policy planning and implementation: Community and provincial participation. *American Journal of Orthopsychiatry*, 89(4), 449–457. <https://doi.org/10.1037/ort0000381>
- Viennet, R., & Pont, B. (2017). *Education policy implementation: A literature review and proposed framework* (162). <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/fe467a64-en>
- Wahyuni, S., & Supriyono. (2019). Excellent Service Dimension from the Early Childhood Education Institute. *Journal of Nonformal Education*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/jne.v5i2.20347>
- Ye, Y. (2024). Implementation Path and Experience Enlightenment of Collaborative Governance of Early Childhood Physical Education in North Rhine-Westphalia, Germany. *Open Journal of Social Sciences*, 12(03), 470–481. <https://doi.org/10.4236/jss.2024.123030>
- Zhang, J. (2025). Shaping the Future: Analysing Early Childhood Education Policy Reforms and Development in China. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.70055>